

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional abad 21 mempunyai pelbagai tantangan yang unik dan kompleks. Desakan arus globalisasi disamping memberikan kebebasan dan keterbukaan warganegara untuk berinteraksi dengan warganegara lain sebagai bagian dari “*global citizen*”, juga menghadirkan pelbagai ancaman, hambatan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai dampak globalisasi.

Globalisasi bercirikan adanya persaingan terbuka yang sangat ketat dan melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Persaingan yang terjadi bukan hanya berlaku bagi warga negara dalam satu negara, melainkan warga negara dalam satu dunia yang melibatkan berbagai negara. Derajat kemampuan suatu negara dalam menghadapi persaingan di era global tidak hanya diukur dari seberapa kaya suatu negara akan sumber daya alam, melainkan seberapa cerdas negara dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Sebagaimana dijelaskan Sanusi (1994: 8) bahwa kekayaan sumber daya alam dari suatu negara bukan lagi merupakan unggulan utama untuk mampu bersaing, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuannya dalam mempersiapkan dan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. *Pertama*, sumber daya manusia yang mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, memiliki kecerdasan dan kreativitas. *Ketiga*, memiliki daya juang yang tinggi dan bermoral. *Keempat*, berketerampilan hidup.

Mengacu pada ciri karakteristik sebagaimana tersurat di atas, dapat ditegaskan bahwa derajat kemampuan suatu negara untuk menghadapi persaingan di era global amat ditentukan oleh kemampuannya mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dan mengembangkan pelbagai kesempatan yang ada serta mampu merubah tantangan yang muncul dalam arus lingkungannya menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa prasyarat-prasyarat dan harapan sebagaimana tersurat di atas nampaknya belum terealisasi sepenuhnya dalam konteks Indonesia kekinian. Hal tersebut ditandai dengan munculnya pelbagai isu peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang selama ini sarat menghiiasi berita di beberapa media, baik cetak maupun elektronik. Kondisi demikian menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai warganegara merdeka menuju masyarakat madani. Kondisi yang lebih memprihatinkan dan patut untuk menjadi bahan perenungan adalah banyak pengangguran yang berasal dari kalangan orang-orang berpendidikan yang secara formal mempunyai gelar sarjana, hal mana sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan sumber daya manusia secara maksimal.

Peningkatan angka pengangguran di Indonesia merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilansir dalam [tribun.com](http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/pengangguran-di-Indonesia-mencapai-739-juta-orang) (tersedia di <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/pengangguran-di-Indonesia-mencapai-739-juta-orang> diakses tanggal 29 Desember 2013) mencatat angka pengangguran di Indonesia saat ini sebesar 7,39 juta orang dari total angkatan bekerja 118,19 juta orang. Dalam setahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja menurun 0,98 persen. Sebagaimana dijelaskan Suryamin bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen.

Jika kita kaji lebih dalam, sebenarnya era globalisasi membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi semua warga dunia untuk dapat membuka usaha. Akan tetapi, besarnya peluang berkompetisi di era global tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh warganegara dengan tingkat kreativitas dan inovasi yang minim. Para lulusan SMA maupun perguruan tinggi dibelenggu dengan paradigma bahwa menjadi pekerja adalah lebih baik daripada menjadi pengusaha, karena minim resiko menghadapi kegagalan. Tetapi, paradigma yang berkembang tersebut nyatanya tidak dibarengi dengan kualitas mutu lulusan yang dihasilkan

dimana para lulusan SMA maupun perguruan tinggi merasa kesulitan untuk meniti karir di dunia kerja ketika selesai melaksanakan studinya karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Secara historis salah satu kegagalan bangsa Indonesia dalam menghasilkan mutu lulusan yang produktif, merupakan dampak dari sistem pendidikan yang diterapkan pada masa orde baru. Hal mana dijelaskan Todaro (2003:7) bahwa pelembagaan nilai-nilai kebangsaan dapat memupuk nilai kebanggaan, kegigihan, kejujuran, patriotisme yang sangat populer ketika zaman orde baru dan banyak membuahkan hasil walaupun pada akhirnya pendidikan yang bersifat indoktrinatif dan refresif dalam pendekatannya membuat rakyat Indonesia tidak berdaya, kurang kreatif, kurang gigih dan militan dalam bekerja, senang berfikir instan dan lebih senang bekerja daripada berusaha sendiri sehingga pembinaan karakter bagi masyarakat harus terus dikembangkan sampai pada masa reformasi seperti sekarang ini.

Sekaitan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berupaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengarahkan pada pembangunan jiwa kewirausahaan peserta didik agar ketika keluar dari bangku persekolahan atau perguruan tinggi mereka dapat menciptakan lapangan usaha bagi sesamanya, dalam arti tidak hanya bergantung pada lowongan kerja di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN maupun menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah adalah memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan atau kecakapan vokasional di dalam kurikulum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan formal. Proses penyempurnaan pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif ke dalam kurikulum yang pada praktiknya, pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif ini dapat terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang diajarkan guru dan atau secara khusus menjadi mata pelajaran muatan lokal.

Arah pendidikan yang bertuju pada terbentuknya jiwa wirausaha peserta didik dewasa ini ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (Kompas, 30 Oktober 2009) yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional harus mengubah metodologi pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar mampu mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif, memunculkan semangat kemandirian dan jiwa kewirausahaan peserta didik, serta menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk respon dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, yang mana globalisasi mempunyai banyak pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala bidang terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendidikan nampaknya lebih luas daripada pembentukan pribadi yang mampu bersaing dalam lingkup nasional, melainkan berorientasi pada terbentuknya warga negara yang mampu untuk bersaing di era global. Pendidikan sebagai sarana pencerdasan dan peningkatan wawasan serta intelektualitas warga negara diarahkan untuk dapat membentuk peserta didik yang memiliki kreativitas, semangat kemandirian berusaha yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan situasi, potensi dan setiap kesempatan yang ada dan bukan malah menggantungkan diri pada tangan orang atau Negara lain sebagaimana jargon yang dikemukakan oleh Bung Karno bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri)

Terkait dengan hal tersebut, Engkoswara (1999:46) menjelaskan kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan global. Tantangan yang terjadi pada era global adalah semakin menipisnya kualitas kemandirian masyarakat Indonesia yang kesemuanya itu harus diselesaikan, salah satunya dengan menggalakan pendidikan kewirausahaan pada setiap lini pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan karena berpengaruh terhadap *output* yang dihasilkan, karena itu pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil semata, akan tetapi *learning by process* yang

dilakukan secara efektif dan efisien agar peserta didik dapat menghayati dan menjalani proses pembelajaran secara bermakna.

Transformasi nilai-nilai kewirausahaan dilakukan sebagai upaya membentuk manusia Indonesia yang unggul dan berdikari, hal mana memfokuskan pada penumbuhkembangan kreativitas dan kemandirian warganegara. Kasmir (2007:18) menjelaskan bahwa secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu (www.google.com diunduh tanggal 1 Maret 2012).

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 961/Kep/M/XI/1995 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada definisi tersebut, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat sesuatu yang baru dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, yang pada akhirnya ikut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan warganegara.

Suryana (2010:11) menjelaskan kewirausahaan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif (*create new and different*) yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah

barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Selanjutnya, ia menjelaskan beberapa hal yang menjadi hakikat penting kewirausahaan antara lain:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*).
5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), dan sesuatu yang berbeda (*innovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih. (Suryana, 2004: 10-11)

Berdasarkan hakikat kewirausahaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu tujuan pelebagaan nilai-nilai kewirausahaan semata untuk memperbaiki kehidupan. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang yang akan memulai suatu usaha harus mampu menganalisis kebutuhan pasar dan situasi ekonomi yang sedang berkembang, kemudian menyikapi situasi tersebut dengan gagasan-gagasan dan ide-ide kreatif yang dapat menjadikan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagaimana Geoffrey (2000:5) menjelaskan bahwa para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Karena itu, aspek penting yang harus ditanamkan dalam proses transformasi nilai-nilai kewirausahaan adalah menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan gagasan-gagasan dalam memandang berbagai peluang.

Seorang wirausahawan tidak terbatas pada usia, hal mana terkadang membuat kita jemu dan rendah diri untuk memulai suatu usaha dikarenakan masih kuatnya anggapan bahwa orang yang muda belum punya banyak pengalaman untuk memulai suatu usaha, maka membuka usaha diwaktu muda tidak akan

berjalan maksimal bahkan cenderung gagal karena belum banyaknya pengalaman yang dirasakan dalam dunia. Anggapan tentang pentingnya kematangan dari segi usia untuk berwirausaha dapat terbantahkan dengan munculnya salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia *Dell Computer Corporation*.

Longenecker (2000:3) memberikan gambaran singkat mengenai sosok wirausahawan yang mendirikan perusahaan "*Dell Computer Corporate*" ia adalah Michael Dell. Ketika menjadi mahasiswa baru di The University of Texas di Austin, Michael Dell mulai menjual komponen-komponen komputer melalui pesanan dari asramanya. Tak lama kemudian, dia telah mengirimkan komponen-komponen tersebut senilai \$80.000 tiap bulannya. dalam waktu singkat, dia mulai membangun perusahaan IBM. Dari petikan cerita tersebut dapat dijelaskan bahwa usia muda bukanlah hambatan bagi kesuksesan Michael Dell sebagai seorang wirausaha. Dia memulai bisnisnya dengan modal yang sangat kecil dengan berbekal tabungan sebesar \$1.000 dan pinjaman bank yang dijamin dengan mobilnya. Dell dapat mengembangkan usaha yang kecil menjadi sebuah bisnis yang sangat luar biasa.

Menjadi seorang wirausahawan bukanlah sesuatu yang tidak disengaja melainkan dipelajari dan dikembangkan. Sekaitan dengan itu, Danial (2010:37) mengemukakan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, antara lain:

1. Menyukai tanggung jawab
2. Lebih menyukai resiko menengah
3. Keyakinan akan kemampuan untuk meraih keberhasilan
4. Hasrat untuk memperoleh umpan balik
5. Tingkat energi yang tinggi
6. Orientasi kedepan
7. Keterampilan mengorganisasi
8. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang

Penumbuhkembangan kreativitas dan jiwa wirausaha amat potensial dilaksanakan melalui proses pendidikan yang dewasa ini bertujuan untuk merubah paradigma berfikir peserta didik menjadi seorang yang kreatif, inovatif dan berpandangan jauh kedepan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang ada dalam jiwanya. Brameld dalam Darmadi (1999:2) mengemukakan "*education as*

power means competent and strong enough to enable us, the majority of people, to decide what kind of a world” yang artinya pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai kewenangan dan cukup kuat bagi kita, bagi rakyat banyak untuk menentukan suatu dunia yang macam apa yang kita inginkan dan macam mana mencapai tujuan semacam itu. Brameld yakin bahwa untuk menciptakan suatu negara yang maju dapat ditempuh melalui pendidikan.

Proses pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pendidikan yang berlangsung di sekolah saja, melainkan dapat berlangsung diluar sekolah seperti di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Richey dalam Darmadi (1999:2) bahwa:

“Education” refers to the broad function of preserving and improving the life of the group through bringing new members into its shared concern. Education is thus a far broader process than that which occurs in schools. It is an essential social activity by which communities continue to exist. In Communities this function is specialized and institutionalized in formal education, but there is always the education, out side the school with which the formal process is related”

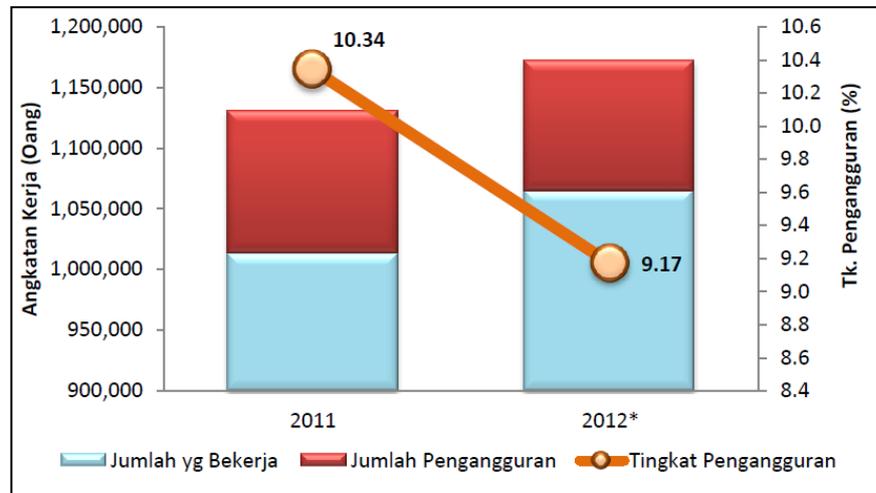
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja tetapi merupakan suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Pada suatu masyarakat yang majemuk, fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah. Proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang mengajarkan bagaimana menjadi orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Thomson dalam Darmadi (1977:1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tepat didalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiranya dan perasaannya. Sekaitan dengan itu, pelembagaan nilai-nilai kreativitas dan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengembangan komunitas-komunitas bisnis di lingkungan masyarakat.

Pengembangan komunitas sebagai kekuatan dalam pembangunan kota relevan dengan studi pendidikan kewarganegaraan, dimana pengembangan

kreativitas, kemandirian, ekonomi kewarganegaraan dan demokrasi merupakan salah satu fokus kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang ilmu yang multidimensional. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut dalam kajian pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan konsep situs kewarganegaraan (*site citizenship*). Winataputra dan Budimansyah (2007:151) menjelaskan situs kewarganegaraan sebagai modus lain dari pendidikan kewarganegaraan yang mencakup berbagai kegiatan yang amat bervariasi dalam tujuan dan formatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kegiatan inovatif dilakukan dalam upaya pengembangan kualitas warganegara sesuai dengan konteks masing-masing negara dan komunitas dalam negara itu. Situs kewarganegaraan sebagai wahana dalam membangun ekonomi kewarganegaraan dilakukan di Italia secara terintegrasi dengan Tirreno Network School Project yang dimulai tahun 1989 dengan pusat perhatian pada “*economic and social problems*” dan melibatkan siswa, orang tua, guru, warga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Bandung sebagai kota kreatif mempunyai berbagai komunitas dalam kaitannya dengan peningkatan kewirausahaan. Tumbuhnya pelbagai komunitas pengusaha merupakan upaya dalam menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2012) mencatat terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja Kota Bandung pada tahun 2012 sebesar 3,70% dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2011, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.129.744 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.171.551 tenaga kerja di tahun 2012. Pada tahun 2012, sebanyak 90,83% dari angkatan kerja telah memiliki pekerjaan dan sisanya sebesar 9,17% masih menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup tinggi, dari sebesar 10,34% pada tahun 2011 menjadi sebesar 9,17% pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara makro, tingkat perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan mengalami perbaikan.

Gambar 1.1
Perkembangan Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2011-2012



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2012)

Melihat data sebagaimana dijelaskan di atas, maka keberadaan komunitas-komunitas wirausaha turut memberikan kontribusi positif dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Kota Bandung melalui program-program guna meningkatkan kreativitas, inovasi dan gagasan-gagasan warga negara. Salah satu komunitas yang konsen terhadap pengembangan nilai-nilai kewirausahaan adalah *Bandung Creative City Forum* (BCCF), dimana salah satu fokus kegiatannya adalah menumbuhkan kreativitas para pengusaha atau calon pengusaha muda di Kota Bandung, karena itu tidak heran jika dalam perjalanannya komunitas ini mampu menghasilkan para pengusaha yang berhasil dan turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Menumbuhkembangkan kreativitas dalam upaya membangun ekonomi kewarganegaraan tidak hanya cukup pada pemerolehan keuntungan semata, akan tetapi lebih daripada itu gerakan ekonomi kewarganegaraan harus dilandasi dengan semangat nasionalisme dalam arti ikhwal apa yang dilakukan merupakan penjelmaan dari kesadaran sebagai sebuah bangsa yang harus mandiri dan berdikari. Terlebih dalam iklim demokrasi yang sudah berjalan hampir 16 tahun di

Indonesia mensyaratkan adanya upaya untuk terus menerus meningkatkan perekonomian negara.

Hasil studi Przeworski dan Limongi dalam Juoro (2004: 14) menunjukkan bahwa proyek demokatisasi akan gagal dilaksanakan bila pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita) suatu negara ada pada level rendah. Hal senada juga diungkapkan Lipset dalam Collier (1979: 9) yang memberikan postulat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terbukanya peluang demokratisasi di masa mendatang. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, sulit bagi terciptanya pemerintahan dan masyarakat demokatis. Karena itu perlu dilakukan penguatan nilai nasionalisme dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka demokrasi. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran nasional yang mengadung cita-cita yang merupakan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk lebih mandiri menghadapi tantangan demokratisasi dan globalisasi. Sebagaimana Isjwara (1982:130) yang menjelaskan salah satu cita-cita nasionalisme adalah perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta adanya solidaritas.

Keberadaan komunitas-komunitas dalam pengembangan ekonomi kewarganegaraan dilatarbelakangi oleh realitas kemiskinan masyarakat yang memprihatinkan telah menarik perhatian pelbagai kelompok masyarakat, baik di sektor swasta (*private sector*) maupun komunitas (*voluntary sector*) yang menunjukkan gerakan aksi kerelawanan untuk mewujudkan keadilan sosial. *Bandung Creative City Forum (BCCF)* merupakan salah satu komunitas yang mempunyai spirit kerelawanan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Spirit ini penting karena semangat kesukarelaan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Kesukarelaan merujuk pada tanggung jawab sosial masyarakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan bukan hanya “kegiatan sesaat” yang semata hadir karena tuntutan proyek atau kepentingan lain yang bersifat jangka pendek (Hilman, 2010: 44).

Kesukarelaan muncul ketika seseorang melihat kondisi lingkungan sekitarnya yang tidak sesuai dengan idealitas atau asas kewajaran aatau standar

minimal hidup yang sejahtera. Hilman (2010: 46) menjelaskan bahwa sikap yang muncul dalam gerakan *voluntarisme* (kesukarelaan) adalah munculnya sikap peduli dan rasa ingin melakukan sesuatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan barangkali ada keinginan untuk mengubah kondisi lingkungannya menjadi lebih baik.

Penguatan gerakan kesukarelaan (*voluntarisme*) diperlukan dalam upaya membangun ekonomi kewarganegaraan agar tercipta masyarakat demokratis, karena keberhasilan pelaksanaan demokrasi di suatu negara amat ditentukan oleh kekuatan perekonomian negara bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mujani (2006: 9) bahwa lambatnya pemulihan ekonomi bisa berdampak negatif terhadap kepuasan publik terhadap praktek demokrasi di negara kita, dan pada akhirnya masyarakat semakin tidak yakin bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik atau paling cocok untuk negara kita.

Mengacu pada pendapat sebagaimana tersurat di atas, dapat dijelaskan bahwa lambannya pemulihan ekonomi nasional secara potensial dapat mengancam legitimasi atas konsolidasi demokrasi. Untuk membangun ekonomi kewarganegaraan dalam menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis diperlukan suatu gerakan *voluntarisme*, yakni sebuah gerakan yang dilakukan masyarakat secara sukarela untuk membantu sesamanya sehingga dapat maju dan berkembang bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuatan kesukarelaan (*voluntarisme*) dalam membangun ekonomi kewarganegaraan merupakan spirit pembangunan dalam upaya menciptakan warganegara yang lebih kreatif, inovatif, bertanggungjawab, disiplin, memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian kuat yang didasari oleh semangat kesukarelaan, keikhlasan, kepedulian sosial dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

Berdasarkan data dan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan situs kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan ekonomi kewarganegaraan berbasis kesukarelaan

warganegara. Karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian dengan judul **“Penguatan Nilai Kesukarelaan dalam Membangun Ekonomi Kewarganegaraan Bagi Masyarakat Demokratis Melalui Situs Kewarganegaraan (Studi Kasus di Komunitas *Bandung Creative City Forum*)”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain; *Pertama*, perjalanan demokrasi tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi nasional; *Kedua*, rendahnya kreativitas warganegara dalam menciptakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan ekonomi. *Ketiga*, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia; *Keempat*, masih kuatnya paradigma bahwa bekerja adalah lebih baik daripada membuka usaha sendiri; *Kelima*, masih rendahnya minat dan motivasi masyarakat terhadap wirausaha; *Keenam*, masih rendahnya keberanian dalam mencari, mengembangkan dan menciptakan peluang dalam upaya meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik. *Ketujuh*, perkembangan ekonomi di Indonesia sebagian besar hanya berorientasi *money oriented*; *Kedelapan*, semakin mudarnya nilai-nilai kebangsaan; *Kesembilan*, pemerintahan memiliki banyak keterbatasan dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang belum sejahtera. Karena itu, fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penguatan nilai kesukarelaan dalam membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.

2. Perumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diidentifikasi di atas, maka penulis merincinya ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang munculnya gerakan kesukarelaan dalam membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan?

Epin Saepudin, 2014

PENGUATAN NILAI KESUKARELAAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI KEWARGANEGARAAN BAGI MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI SITUS KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Bagaimana aktivitas dan kekuatan kesukarelaan dalam membentuk ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan?
- c. Faktor-faktor apa saja yang determinan terhadap pengembangan situs kewarganegaraan dalam memobilisasi gerakan kesukarelaan untuk mendukung keberhasilan program ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan?
- d. Hambatan apa saja yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam penguatan nilai kesukarelaan sebagai upaya membentuk ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis penguatan nilai kesukarelaan dalam membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan yang pada akhirnya hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh para pemerhati, pengembang dan para pemangku kebijakan dalam menumbuhkembangkan spirit kesukarelawanan dan kemandirian masyarakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi dalam mendukung perjalanan demokrasi di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang munculnya gerakan kesukarelaan dalam membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas dan kekuatan kesukarelaan dalam membentuk ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.
- c. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang determinan terhadap pengembangan situs kewarganegaraan dalam memobilisasi

gerakan kesukarelaan untuk mendukung keberhasilan program ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.

- d. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam penguatan nilai kesukarelaan sebagai upaya membentuk ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat, terutama dalam pengembangan konsep ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis berbasis nilai kesukarelaan melalui situs kewarganegaraan.

2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada tataran praktis sebagai berikut:

- a. Diketuinya latar belakang munculnya gerakan kesukarelaan dalam membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.
- b. Diketuinya aktivitas dan kekuatan kesukarelaan dalam membentuk ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.
- c. Diketuinya faktor-faktor yang determinan terhadap pengembangan situs kewarganegaraan dalam memobilisasi gerakan kesukarelaan untuk mendukung keberhasilan program ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.
- d. Diketuinya hambatan yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam penguatan nilai kesukarelaan sebagai upaya membentuk ekonomi

kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis melalui situs kewarganegaraan.

E. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar belakang masalah, b) Identifikasi dan perumusan masalah, c) Tujuan penelitian, d) Manfaat penelitian dan e) Struktur organisasi tesis.
- Bab II Kajian Pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) Nilai kesukarelaan (*voluntarisme*), b) Konsep *economic civics*, dan c) Situs kewarganegaraan, d) Kerangka pemikiran, dan e) Penelitian terdahulu.
- Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) Lokasi dan subjek penelitian, b) Desain penelitian dan justifikasi penggunaan desain tersebut, c) Metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode tersebut, d) Definisi operasional yang dirumuskan untuk setiap variabel, e) Instrumen penelitian, f) Teknik pengumpulan data, dan g) Teknik pengolahan dan analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) Deskripsi hasil penelitian, dan c) Analisis hasil penelitian.
- Bab V Simpulan dan Saran, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan (umum dan khusus) serta saran.